

# BAB I

## PENDAHULUANN

### A. Latar Belakang

Pemerintah sebenarnya untuk melayani serta mensejahterakan rakyatnya. Ketika pemerintah melaksanakan kewenangan dan kekuasaannya dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, kemasyarakatan, kebudayaan, ketahanan negara, dan keamanan, pemerintah hanya terfokus pada mewujudkan hak dan kebutuhan dasar rakyatnya. Secara normatif, selain masyarakat dan wilayah, hadirnya pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam mendirikan negara modern. Masyarakat yang bersangkutan memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat sebagai salah satu tugas dan fungsi utamanya (Nawawi, 2013, p. 17).

Suatu pemerintahan berkewajiban menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, baik pelayanan yang berupa barang atau pelayanan. Pelayanan ini diberikan kepada masyarakat melalui struktur daerah seperti lembaga, instansi dan dinas pemerintah lainnya. Bentuk pelayanan publik yang digunakan setiap orang setiap hari merupakan salah satu fasilitas umum berupa jalan umum, dan bangunan pendukungnya meliputi: jembatan, saluran drainase jalan. Jalan adalah contoh pembangunan fisik, dan prasarana transportasi umum dan fasilitas umum yang paling banyak digunakan di masyarakat, pejalan kaki, dan pengendara kendaraan bermotor, yang merupakan ruang lingkup dari DPU (Dinas Pekerjaan Umum).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditetapkan bahwa: “Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari otonom”. Pemerintah daerahpun mengemban tugas mengkoordinasikan semua kepentingan masyarakatnya pada wilayahnya melalui aspirasi masyarakat dan pembenahan/penyelenggaraan keuangan serta pelayann administrasi. Disebutkan bahwasanya kewenangan administratif merupakan tolak ukur kegiatan pembangunan yang ditargetkan di sebuah daerah.

Kemudian Undang-Undang No.1 2004 terkait perbendaharaan, laporan keuangan/pembendaharaan harus disusun sesuai dengan kewenangan masing-masing pengguna anggaran dan pengguna anggaran serta tata cara akuntansi pejabat keuangan kepala daerah. Mengingat tugas pokok tersebut di atas telah memiliki laporan keuangan yang lengkap dan disusun melalui proses yang bertanggung jawab, maka diharapkan sistem akuntabilitas pemerintah daerah sebagai pengelola dapat diusulkan dan dipercaya dengan baik. oleh orang-orang sebagai pemangku kepentingan.

Pendaharaan Wilayah yang Tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 dinyatakan bahwasanya “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.” Keuangan wilayah terhitung ke dalam APBD serta

perencanaannya dilakukan dalam satu periode anggaran serta disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rangka desentralisasi tugas, APBD mempunyai fungsi mencatat serta pengelolaan atas pendapatan dan belanja daerah serta tidak memuat atau mencatat tugas desentralisasi atau pembantuan.

Melihat Pemerintah Kota Bandung yang memprioritaskan industri jasa. Peneliti telah mengindikasikan bahwa berbagai instansi pemerintah bertekad untuk menjaga uang masyarakat Bandung di kota secara bergiliran, dan berpartisipasi dalam sirkulasi perkotaan di luar kota Bandung. Hal ini terkait dengan visi Pengembangan Juara Bandung. Dalam rangka mencapai visinya, Pemerintah Kota Bandung harus mampu menyediakan serta memenuhi kebutuhan pembangunan kota serta pengelolaan infrastruktur perkotaannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan supaya investor, pendatang, serta wisatawan, mampu menganggap bahwa kota Bandung mempunyai aksebilitas yang baik. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung merupakan salah satu indikator terwujudnya Visi Kota Bandung.. Memberikan kemudahan akses untuk meningkatkan daya tarik dan investasi sebagai daerah tujuan wisata.

Pemerintahan di Kota Bandung mempunyai 21 Intansi yang salahsatunya adalah Dinas/Intansi Pekerjaan Umum Kota Bandung serta anggarannya bersumber dari APBD, yang kemudian diimplementasikan dalam kegiatan dan dilaporkan dalam suatu laporan keuangan serta direncanakan pada setiap satu periode anggaran. Belanja anggaran dilakukan pada saat kebutuhan pelayanan dibelanjakan, yaitu dalam

laporan realisasi APBD menunjukkan laporan anggaran yang direncanakan dari realisasi anggaran itu sendiri.

APBD sendiri akan memberikan anggaran yang lebih besar, yang dapat melampaui anggaran yang diperkirakan oleh dinas atau pemerintah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran kantor Dinas Pekerjaan Umum digunakan untuk keperluan kantor, acara dan keperluan lainnya sesuai rencana. Oleh karena itu, perlu disusun laporan realisasi anggaran supaya pemerintah mengetahui jumlah dana yang terserap untuk kegiatan tersebut, dan surplus atau defisit yang diperoleh dari kegiatan tersebut dapat dilihat dari pelaporan realisasi anggaran. Pelaporan realisasi anggaran memberikan beberapa informasi dengan menampilkan laporan keuangan pada saat yang bersamaan, dan informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai Sumber daya ekonomi yang tersedia untuk anggaran pusat dan daerah dengan anggaran untuk kegiatan di masa depan.

Pengantar laporan manajerial keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang disebut Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam laporan ini terdapat kesalahan dalam realisasi anggaran dan realisasi belanja, serta perbedaan LRA. Ini terjadi karena beberapa alasan diantaranya Personil yang tidak mengetahui atau memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman perencanaan dan kegiatan. Serta metode manajerial keuangan yang belum selaras dengan aturan, sehingga perbedaan antara anggaran dan realisasi tidak harus terlalu jauh. Namun pelaporan realisasi anggaran tidak berdampak nyata kepada

penyelesaian laporan ini, namun selisih anggaran serta realisasinya berdampak kepada kegiatan selanjutnya.

Analisis varians anggaran adalah kegiatan yang dirancang dalam menentukan selisih dengan realisasi dan anggaran yang tersedia. Perbedaan yang dianalisis adalah anggaran yang belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi bagaimana kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung terkait selisih yang ada.

Laporan pelaksanaan anggaran Dinas PU Bandung Tunjukkan Kesenjangan Anggaran dengan pelaksanaannya, tetapi itu kurang baik, terlihat pada laporan 2017-2019 selisihnya tahunan. Belanja Anggaran Pekerjaan di Kota Bandung (DPU) 2015-2019:

**Tabel 1. Pelaksanaan APBN 2015-2019**

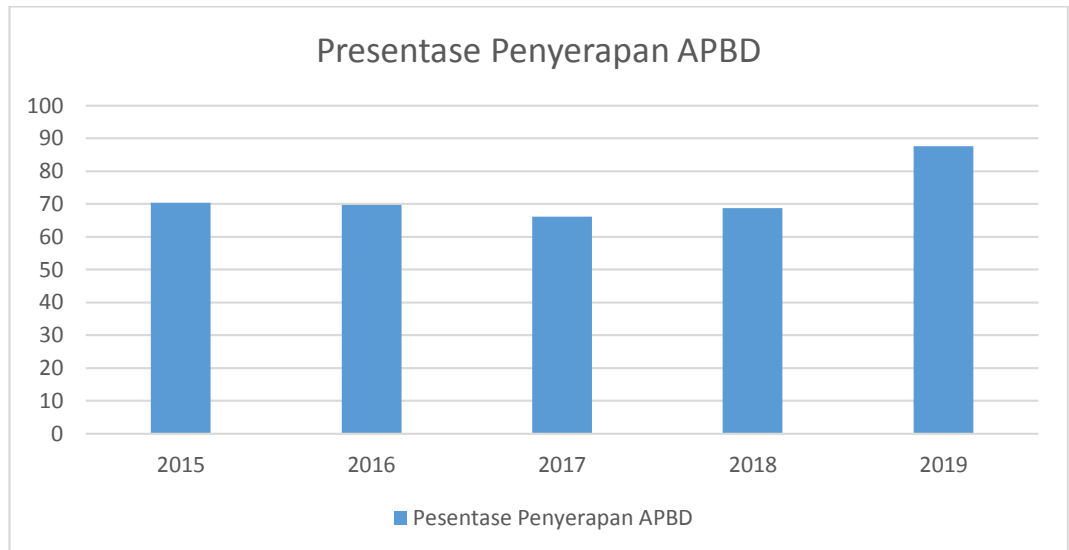
Tahun	Anggaran APBD	Realisasi	%	SILPA
2015	810.687.609.130,32	570.931.805.713.00	70.43	239.755.803.417,32
2016	899.876.349.915.00	626.771.434.611.00	69.65	273.104.815.304.00
2017	654.321.336.765.00	432.706.823.958.00	66.13	221.645.128.070.00
2018	591.865.451.205.12	406.407.291.566.00	68.67	185.458.159.639.12
2019	363.095.736.769.00	317.794.776.558.00	87.52	45.300.960.211.00

*Sumber: DPU tahun 2015-2019*

Sesuai dengan Data yang uraikan, besaran APBD berubah dan persentase realisasi anggarannya tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Meski penurunan terjadi pada tahun-tahun terakhir, namun serapan anggaran terus menurun.

Berikut analisis serta penghitungan awal penyerapan anggaran wilayah dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.

**Gambar 1. 3 Presentase Penyerapan APBD tahun 2015-2019**



*Sumber: Peneliti 2021*

Penyerapan anggaran mencapai 70,43% pada tahun 2015, kemudian menurun dari tahun 2016 ke tahun 2017 untuk tahun kedua berturut-turut, 69,65% 66,13%, penyerapan meningkat menjadi 68,67% Di 2018 dan lagi di 2019. Peningkatan menjadi 87,52%. Anggaran penyerapan APBD yang masih fluktuatif dilihat dari jumlah SILPA yang cukup besar menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang kurang maksimal, meskipun terjadi kenaikan pada serapan anggaran pada tahun terakhir namun jumlah anggaran APBD nya semakin menurun.

Melihat data yang ada, simpulan sementara ialah fluktuasi kinerja realisasi anggaran tidak selalu dianggap baik, karena dapat dikatakan penyerapan realisasi yang signifikan ialah persentase kinerja dengan serapan di atas 90%. Perbedaan antara pendapatan yang diperoleh dari

penganggaran belanja dengan realisasi tahun demi tahun juga harus diperjelas supaya arah, maksud dan tujuan kinerja keuangan semakin jelas. Perbedaan tersebut lebih terjadi karena beberapa aspek, yaitu kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan program yang belum sesuai rencana, dan terjadi pemborosan pada rencana yang dibuat oleh berbagai departemen yang ada pada dinas pekerjaan umum, pengeluaran penganggaran kegiatan resmi, dan pengelolaan uang yang buruk. Karena setelah dilakukan perhitungan yang cermat dan kesepakatan bersama dari berbagai pihak dari awal perencanaan, keuangan yang diberikan harus selaras dengan anggaran yang dirumuskan bersama dalam aturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, perlunya dilaksanakan penelitian mendalam terhadap kinerja tingkatan ke Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Jika kinerja keuangan akan dianalisis, perlu untuk memberikan teori pendukung berdasarkan masalah tersebut. Sesuai dengan permasalahan yang sudah diuraikan, maka peneliti tertarik meneliti **“Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Analisis Laporan Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung”**

## **B. Mengidentifikasi Masalah**

Menurut latar belakang yang dijelaskan, berbagai fakta masalah yang dihadapi ditemukan seperti tidak maksimalnya proses perancangan anggaran dalam penyusunan pelaporan keuangan, adanya ketidaksesuaian

penganggaran yang telah dialokasikan dengan realsisasinya, serta ketidaksesuaian perancangan anggaran dengan pembangunan di lapangan.

Fokus Penelitian ialah pencarian jawaban akan persoalan mengenai suatu permasalahan (suyanto, 2013, p. 170). Berdasarkan identifikasi masalah di atas, fokus penelitian ini adalah untuk terkait penilaian kinerja keuangan berdasarakan analisis laporan keuangan yang di batasi pada anggaran APBD yang belum terealisasi secara maksimal.

### **C. Rumusaan Permasalahaan**

Berdasarkan identifikasi masalah, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:: “Bagaimana penilaian kinerja keuangan berdasarkan analisis laporan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung?”

Yang ditinjau melalui:

1. Berapa Rencana Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ?
2. Bagaimana Penerapan Anggaran retribusi Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ?
3. Bagaimana Pengawasan Anggaran ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:



1. Mengecek rencana anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.
2. Konfirmasi pelaksanaan penghimpunan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.
3. Memeriksa pengelolaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.

## **E. Manfaat penelitian**

### **1. Manfaat teoretis**

Untuk meningkatkan wawasan serta ilmu pengetahuan bagi peneliti mengenai ilmu Administrasi Publik utamanya terkait keilmuan Administrasi Keuangan Negara mengenai pengukuran kinerja keuangan pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.

### **2. Praktis Manfaat**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan ide bagi peneliti, dan penelitian ini merupakan proses praktis untuk menerapkan pengetahuan tersebut. pengetahuan yang diperoleh peneliti selama studi formal.
- b. Untuk universitas, ini seri penelitian atau artikel penelitian harus menjadi bahan referensi dan bekerja untuk peneliti lain dalam disiplin ilmu lain.
- c. Kami berharap Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dapat menjadi pedoman atau rekomendasi bagi organisasi dimana penelitian pengukuran kinerja bertujuan untuk menciptakan

akuntabilitas dalam pemberian pelayanan. lebih baik dan lebih bermanfaat.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 4(1) tentang Departemen Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai oleh APBD. Selain itu, Pasal 33, Pasal 67(1) Undang-Undang Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2004 Dasar APBD Pemerintah Daerah Dan Pengeluaran Daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan belanja daerah. Jika dana untuk mendanai APBD tidak ada atau tidak mencukupi, semua birokrat dilarang melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan pada pembiayaan atas tanggungan APBD. Artinya, semua kegiatan pemerintahan, termasuk DPU Kota Bandung yang bertindak sebagai pemakai anggaran, patut berpegang kepada kebijakan daerah mengenai APBD.

Substansi dari akuntansi merupakan bagian yang ada pada pemerintah dalam pengelolaan anggaran, pengelolaan kekayaan, serta kewajiban menyediakan laporan keuangan berdasarkan akuntansi yang dilakukannya (Tanjung, 2012, p. 10). Maka dari itu Dinas Pekerjaan Kota Bandung mempunyai tanggung jawab menyediakan laporan keuangan serta penyusunan LAKIP. Data yang diambil dari laporan keuangan serta LAKIP inilah yang dibutuhkan dalam proses penelitian dalam pengukuran kinerja

keuangan, analisis laporan bertujuan untuk membantu mengevaluasi kinerja, memahami angka yang terdapat pada laporan, serta memanfaatkan informasi dalam pengambilan keputusan.

Menurut Mahmudi (Mahmudi, 2016, p. 89) The melakukan penilaian kinerja keuangan rinci melalui analisis laporan keuangan. Anda dapat melihat kinerja keuangan Anda di neraca, pelaporan keuangan, pelaporan pelaksanaan anggaran, dan pelaporan arus kas. Kebutuhan untuk menganalisis laporan keuangan untuk memberikan perkiraan kinerja keuangan. Analisis neraca membutuhkan keterampilan khusus agar kegiatan analitis masuk akal untuk langkah-langkah pengambilan keputusan strategis. Mekanisme yang peneliti gunakan untuk menganalisis frekuensi adalah analisis perbedaan (*analysis of variance*).

Mahmudi (Mahmudi, 2016, p. 90) mengemukakan bahwa analisis varians (*analysis of variance*) biasanya dilaksanakan guna mempelajari laporan realisasi anggaran, yang dilaksanakan dengan teknik menilai selisih antara anggaran dengan realisasinya. Perbedaan anggaran bisa dibagi menjadi 2 kategori, perbedaan antara kesenangan dan ketidaknyamanan. Yang membutuhkan analisis lebih mendalam adalah perbedaan yang tidak memuaskan. Aspek esensial yang perlu diperhatikan dalam analisis varians ini ialah:

1. Menilai derajat varians anggaran. Apakah varians anggaran beserta realisasi dianggap signifikan.
2. Mendefinisikan tingkat varians anggaran yang bisa ditoleransi.
3. Menelusuri faktor masalah terjadinya selisih anggaran.

4. Analisis varians yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran, bisa dipergunakan dalam menelaah pendapatan dan belanja.

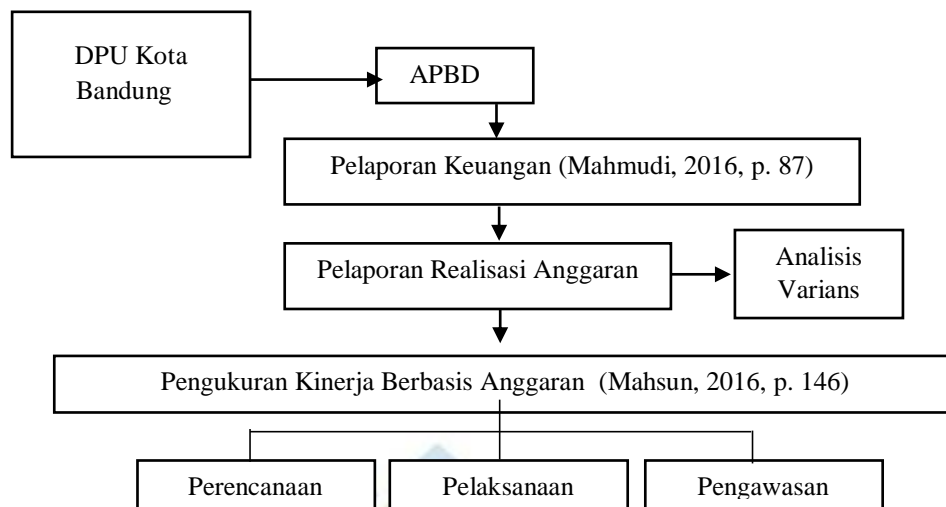
Undang-Undang Menteri Dalam Negeri tahun 1996 tentang Penilaian Perbendaharaan dan Standar Kinerja dapat ditentukan dengan memenuhi kriteria berikut:

- a. (100%) Ssangat Efisien
- b. (900%) efisien
- c. (80%) Cukupp Efisien
- d. (60%-80%) Kuurang efisien
- e. Dibawah (60%) tidak efisien

Menurut (Fahmi, 2012, pp. 2-3) Kinerja keuangan merupakan analisis untuk memahami bagaimana suatu instansi pemerintah menerapkan aturan pelaksanaan keuangan yang benar dan efektif. Kemudian dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan menjadi alat yang dapat pergunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah organisasi memenuhi kewajibannya berdasarkan perannya dalam pelaksanaan keuangan. (Mahsun, 2016, p. 146) Dalam evaluasi kinerja berbasis anggaran, pemahaman kita tentang tiga (tiga) siklus utama pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan, ialah;

1. Perencanaan: Perumusan awal anggaran
2. Pelaksanaan: Realisasi Anggaran
3. Pengawasan/control: Controlling Penggunaan Anggaran

Dalam memperjelas arah dan konsep penelitian, peneliti merumuskan kerangka konseptual penelitian seperti berikut:

**Gambar 1.4 Kerangka Pemikiran**

*Sumber: diolah oleh peneliti 2021*

